

Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

Rahmiyati Bobihu¹, Rosman Ilato², Ismet Sulila³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Email: rahmibobihu04@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dilihat dari aspek Pengambilan Keputusan, Pelaksanaan Kegiatan, Pemanfaatan Hasil Pembangunan, Pemantauan dan Evaluasi. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan Observasi dan Wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya saja pada tahap Pengambilan Keputusan kurang maksimal dikarenakan perbedaan pendapat yang kerap terjadi ketika Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah seperti MUSDUS maupun MUSRENBANGDES yang mengakibatkan sulitnya dalam menentukan hal apa saja yang akan dilakukan dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci : *Partisipasi Publik, Pengelolaan Dana Desa*

Article Info

Received date: 15 September 2023

Revised date: 26 Sept. 2023

Accepted date: 13 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Menurut Akil Rahman dalam Andriani (2019: 2) Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Selanjutnya, Wilda dalam Andriani (2019:2) menjelaskan bahwa masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Banyaknya kasus penyimpangan penggunaan dana desa menurut pemerintah untuk melakukan pembenahan, baik dengan pembenahan aparat desa maupun dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen publik yang baik. Putra & Rasmini dalam Maryono & Putri (2022 : 1670). Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas-asas transparansi, akuntabel, dan partisipasi serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, diperlukan aparat desa yang andal dan berkompeten, baik secara teknis maupun administratif dalam pengelolaan dana desa. Masruhin & Kaukab dalam Maryono & Putri (2022:1670).

Prinsip partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa harus ada, prinsip tersebut menjadi penting karena dapat membangun tujuan bersama dalam hal prioritas pembangunan di desa. Apa yang menjadi kebutuhan di desa baik itu dalam bentuk pelayanan publik maupun dalam bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat

tereralisasi dengan nyata dan terukur. Menurut Siswandi dalam Aqfir dan Yanto (2020:68) mendapatkan bahwa partisipasi berpengaruh secara simultan terhadap keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa prinsip partisipasi dari masyarakat dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan dan desa memberikan kontribusi yang nyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Prastowo dalam Wardani & Fauzi (2018:112) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar ilmiah tanpa ada manipulasi dan tanpa pengujian hipotesis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dalam hal ini adalah Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara terhadap informan yang telah ditentukan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang dikumpulkan melalui telaah dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2015:204) Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Metode wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas. Menurut Oktaviani (2022:29) metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, notulen rapat, agenda lain dan sebagainya. Jadi, pada teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan, menuliskan, melaporkan, sehingga tersusun dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian tersebut.

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sedemikian rupa, sehingga mudah dipahami, sehingga mudah dipahami dan temuan dapat dikomunikasikan kepada orang lain dengan mengorganisasikan data kedalam kategori-kategori, menguraikannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, pengorganisasian, menyusun ke dalam pola, memiliki apa yang mudah dipahami untuk diri sendiri dan orang lain. Analisis kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menyempurnakan pernyataan untuk membuat kesimpulan yang jelas, metode ini digunakan untuk menganalisis literatur atau sumber data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa dinyatakan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dianut dalam pengelolaan keuangan yang baik, terkendali sesuai dengan disiplin anggaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Dalam mendukung terwujudnya *Good Governance* selain asas transparansi dan akuntabel, asas partisipatif juga diperlukan dalam hal ini adalah Partisipasi masyarakat Pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut untuk menjaga Pengelolaan Dana Desa agar supaya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan diadakannya Dana Desa yakni untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan hasil penelitian yang diuraikan pada bagian hasil penelitian kemudian digunakan dalam pembahasan sesuai dengan fokus dan sub fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pengambilan Keputusan

Menurut Steiner dalam (Rifa'i 2021:3) mendefinisikan bahwa pengambilan keputusan sebagai suatu proses manusiawi yang didasari dan mencakup baik fenomena individu maupun fenomena sosial, didasarkan pada premis nilai dan fakta, menyimpulkan bahwa pilihan dari alternatif dengan maksud bergerak menuju suatu situasi yang diinginkannya.

Pengambilan keputusan dalam negosiasi terjadi dengan cara tertentu yaitu musyawarah mufakat dan suara terbanyak. Hasil musyawarah kontrak yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah menjadi dasar bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam menyusun instruksi kepada Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa harus mempertimbangkan dan menyalurkan keinginan masyarakat desa, sehingga keputusan yang diambil dalam musyawarah desa menjadi dasar penyusunan peraturan desa. Dalam setiap rencana kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggambarkan perkiraan pendapatan desa, serta asumsi latar belakang sebagai dasar alokasi dana. Rencana kerja tersebut meliputi rencana anggaran, prioritas pembangunan dan komitmen desa. Prioritas pembangunan desa merupakan kebijakan yang dipilih sebagai strategi untuk mencapai hasil sasaran yang ingin dicapai selama masa pembangunan. Rencana kerja memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan, tujuan yang direncanakan dan hasil atau yang akan dicapai.

Adapun hasil penelitian yang ditemukan di Desa Lamu Kecamatan Tiliamuta Kabupaten Boalemo adalah untuk pengambilan keputusan terkait Pengelolaan Dana Desa yang melibatkan partisipasi mulai diadakannya perencanaan dan pembangunan APBDes dalam hal ini adalah MUSRENBANGDes. Namun berbeda dengan yang ditemukan peneliti yaitu dalam musyawarah tersebut partisipasi masyarakat masih sangat minim dikarenakan kehadiran daripada masyarakat itu sendiri, sehingga Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Lamu mengalami kendala dalam Pengambilan keputusan.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Menurut Mansur dkk (2021:355) mengemukakan bahwa partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Selanjutnya, Riski (2019:11) mengartikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam partisipasi lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan dana desa sudah dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ini Pemerintah Desa bisa terarah dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Lamu Kecamatan Tiliamuta Kabupaten Boalemo sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian berdasarkan temuan peneliti bahwa untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan pada Pengelolaan Dana Desa di Desa lamu Kecamatan Tiliamuta Kabupaten Boalemo, dimulai dari:

a. Persiapan lahan atau lokasi pembangunan

- b. Menyediakan bahan yang diperlukan dalam pembangunan
- c. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setelah pencairan keuangan desa.

3. Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Pemanfaatan Hasil Pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Tetapi, partisipasi masyarakat dalam Pemanfaatan hasil Pembangunan yang sering terlupakan. (Riski 2019:12).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat Desa Lamu umumnya terlibat aktif dalam memanfaatkan hasil pembangunan yang ada. Namun, seperti sudah menjadi budaya baru di Indonesia dimana masyarakat lebih aktif dalam memberikan saran dan kritikan dibandingkan terjun langsung ke lapangan. Namun, berbanding terbalik dengan masyarakat Desa Lamu mereka lebih aktif ketika terjun langsung ke lapangan dibandingkan memberikan saran dan kritikan kepada Pemerintah Desa terkait Pemanfaatan Hasil Pembangunan yang dalam hal ini menggunakan anggaran dana desa. Selanjutnya, berdasarkan temuan peneliti bahwa untuk Pemanfaatan Hasil Pembangunan pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dimulai dari:

- a. Penyerahan fisik atau sarana dan prasarana dari TPK kepada Pemerintah Desa.
- b. Selanjutnya, penyerahan sarana dan prasarana dari Pemerintah Desa kepada masyarakat sebagai sasaran program penerima Hasil Pembangunan dalam hal ini adalah infrastruktur yang menggunakan Anggaran Dana Desa.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Riski (2019:12) mengemukakan bahwa pembangunan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi program dan proyek reaktualisasi sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya bisa dicapai sesuai dengan yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk mengumpukan masalah-masalah dan kendala yang tampak bagian dalam penggunaan reaktualisasi yang bersangkutan.

Tingkat partisipasi dalam tahap evaluasi hasil pembangunan adalah tingkat partisipasi masyarakat Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo melalui penggunaan Dana Desa dalam penilaian keberhasilan hasil pembangunan. Tujuan dari evaluasi hasil pembangunan adalah untuk melihat sejauh mana kemungkinan tercapainya tujuan yang diinginkan oleh warga Desa Lamu, dalam hal ini adalah pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan juga unsur masyarakat sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pemantauan dan evaluasi dari pemerintah Desa dan juga unsur masyarakat melalui 3 tahapan yakni tahapan yang dimulai dari 0-41% pekerjaan, kemudian 41-80% pekerjaan dan yang terakhir adalah 80-100% pekerjaan pembangunan di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Sehingga dalam Pemantauan dan Evaluasi ini dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Kemudian, berdasarkan temuan lain oleh peneliti bahwa Pemantauan dan Evaluasi pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dimulai dari:

- a. Pemerintah Desa, BPD, masyarakat yang dalam hal ini disebut dengan Tim 11 dan juga tim pengawasan dari tingkat kecamatan melaksanakan pemantauan terhadap kemajuan fisik dalam hal ini infrastruktur yang ada di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang menggunakan anggaran Dana Desa.
- b. Tim 11 juga melaksanakan evaluasi pada setiap perkembangan pekerjaan pembangunan yang ada di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.
- c. Selanjutnya, pembuatan laporan terkait evaluasi yang dilaksanakan oleh tim 11 tersebut yang akan diberikan kepada pihak kecamatan hingga pihak kabupaten.

KESIMPULAN

1. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan seperti musyawarah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa masih kurang dan setiap musyawarah yang secara aktif dihadiri oleh perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa, dan beberapa warga masyarakat, namun hanya dihadiri oleh orang yang sama, sehingga Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Lamu mengalami kendala dalam mengambil keputusan sementara semua usulan terkait pembangunan berasal dari masyarakat itu sendiri.
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang juga terus dilakukan oleh Pemerintah Desa itu sudah sangat cukup bermanfaat bagi masyarakat Desa Lamu. Hal ini terlihat dari efektifnya aparat desa dan masyarakat Desa Lamu yang bekerja melakukan pekerjaan pembangunan, itu juga terlihat dalam beberapa program yang sudah terlaksana.
3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan juga sudah optimal, dan juga dalam hasil pembangunan ini digunakan dalam setiap tahapan untuk kepentingan masyarakat luas. Hal ini bisa dilihat dari Pemerintah Desa dalam memberikan himbauan atau pencerahan kepada masyarakat Desa Lamu terkait pemeliharaan infrastruktur yang ada di Desa Lamu sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Sehingga bisa mewujudkan tujuan dari pembangunan itu sendiri yakni untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa Lamu.
4. Partisipasi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam tahap evaluasi juga sudah cukup maksimal, hal ini dapat dilihat dari proses pembangunan yang dipantau langsung oleh Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, dan ketua BPD.

Referensi

- Andriani, M. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). *E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa*, 1(2), 1-13.
- Putri, A. R. L. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(Special Issue 3), 1668-1688.
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2).
- FIKY, R. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2018* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Mansur, M., Agustang, A., Idhan, A. M., Kadir, Y., & Nuna, M. (2021). Perencanaan Partisipatif Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mengelola Apbdes. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 8(2), 349-362.